

**LAPORAN LKPJ DAN LPPD  
KECAMATAN PANYIPATAN  
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
KECAMATAN PANYIPATAN**

Jalan : Sei. Paring RT. 10 Panyipatan NKP. 70871

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 69 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setelah tahun anggaran berakhir Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada (LKPJ) kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

LKPJ dan LPPD disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Maksud LKPJ - LPPD ini dibuat sebagai Pedoman bagi Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan dalam mendukung segala Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan, karena Kecamatan Panyipatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dapat berdiri sendiri dalam pembuatan perencanaan dan pengelolaan keuangannya.

Tujuan Penyusunan LKPJ - LPPD ini adalah untuk memberikan arah bagi kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, *Pembangunan dan Kemasyarakatan yang menjadi tugas pokok* Kecamatan Panyipatan, juga dalam rangka membantu memfasilitasi segala bentuk Aspirasi masyarakat/Stakeholders dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Landasan Hukum penyusunan LKPJ- LPPD adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah – Laut Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tanah – Laut Tahun 216 Nomor 25):dan
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tanah – Laut Tahun 2016 Nomor 88)

## B. Gambaran Umum

### a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan

Panyipatan antara lain :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Tata Pemerintahan
5. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum (Trantib)
6. Seksi Kemasyarakatan
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa
8. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
9. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

b. Kepegawaian

Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Panyipatan sampai dengan bulan Desember 2020 berjumlah orang yang terdiri dari:

1. PNS : 14 orang
2. PTT : 10 orang

Tabel 1. Daftar PNS Menurut Pangkat dan golongan dan pendidikan

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Pendidikan
1	2	3	4
1.	Agus Setiyo, S.STP, M.M NIP. 19850808 200412 1 001	Penata Tk. I (III/d) Camat	S.2
2.	Muhammad Luthfi Akbar, S.IP NIP.19860415 200701 1 001	Penata Tk.I (III/d) Sekretaris Camat	S.1
3.	Ardiansyah, AMK. NIP. 19670411 198803 1 009	Penata Tk. I (III/d) Kasi Pelayanan	D3
4.	Drs. H. Asmariansyah, MAP NIP. 19621210 198903 1 018	Pembina (IV/a) Kasi Tramtib	S.2
5.	Firmansyah, S.IP NIP. 19650221 198601 1 002	Kasi Kemasyarakatan	S.1
6.	Drs. H. Kamaruzzaman NIP. 19670803 199303 1 004	Pembina (IV/a) Kasi Tapem	S.1
7.	Zulkipli, SP NIP. 19660312 198803 1 018	Penata (III/d) Kasi PMD/K	S.1
8.	Firmansyah, S.IP NIP. 19650221 198601 1 002	Penata (III/d) Kasubbag Umum & Peg.	S.1
9.	Surya Lestari,SE NIP.19830116 201001 2 014	Kasubbag Perenc. & Keu.	S.1
10.	Padilah Akbar, S.Sd, MM NIP. 19650607 198503 1 008	Pembina (IV/a) Analisis Data dan Informasi	S.2
11.	Fahmie Risdani,A.Md. NIP. 19841206 200501 1 005	Pengatur Tk.I (II/d) Bendahara	D.III
12.	H. Darhani NIP. 19670323 200701 1 023	Pengatur (II/c) verifikatur	SLTA
13.	Amid NIP. 19681209 200701 1 022	Pengatur Muda (II/a) Pengadministrasi Umum	SLTA
14.	Maspupah NIP. 19710215 201406 2 001	Pengatur Muda (II/a) Pengelola Kesejahteraan Sosial	SLTA

Sumber: Bagian umum dan kepegawaian

Tabel 2. Jumlah PNS kantor Kecamatan Panyipatan tahun 2020 berdasarkan pangkat / golongan :

NO.	PANGKAT	URAIAN		JUMLAH (ORANG)	KET
1.	Pembina	Golongan	IV / a	2	
2.	Penata Tk. I	Golongan	III / d	6	
3.	Penata Muda Tk.I	Golongan	III / b	0	
4.	Penata Muda	Golongan	III / a	2	
5.	Pengatur Tk. I	Golongan	II / d	2	
6.	Pengatur	Golongan	II / c	0	
7.	Pengatur Muda Tk.I	Golongan	II / b	2	
<b>JUMLAH</b>				<b>14</b>	

Tabel 3. Jumlah PNS kantor Kecamatan Panyipatan tahun 2020 berdasarkan kualifikasi pendidikan :

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG	KETERANGAN
1.	Pasca Sarjana / Strata 2 / S2	3	
2.	Sarjana / Strata 1 / S1	6	
3.	D III	2	
4.	SLTA / Sederajat	3	
5.	SLTP / Sederajat	0	
<b>JUMLAH</b>		<b>14</b>	

### **c. Data Statistik**

Kecamatan Panyipatan adalah bagian dari wilayah Kabupaten Tanah Laut, terletak pada :

114,619° – 114,825° Bujur Timur

3,88573° – 4,8015° Lintang Selatan

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kecamatan Pelaihari

Sebelah Timur : Kecamatan Jorong

Sebelah Barat : Laut Jawa dan Kec.Takisung

Sebelah Selatan : Laut Jawa

Tinggi dari permukaan laut sebagian besar : 25 - 100 meter

Luas Wilayah : 336,00 Km<sup>2</sup>

Jumlah Desa : 10 Desa

Jarak tempuh Kecamatan Panyipatan ke pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Laut adalah :

- a) Jarak pusat pemerintahan Kecamatan Panyipatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Laut adalah 23 Km dengan waktu tempuh 30 menit.
- b) Jarak pusat pemerintahan Kecamatan Panyipatan dengan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan adalah 88 Km dengan waktu tempuh 180 menit.

Tabel 4.

## Jumlah Desa di Kecamatan Panyipatan dan Luas Wilayahnya

No.	Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase
1.	Batakan	45,00	13,39
2.	Tanjung Dewa	42,00	12,50
3.	Kandangan Lama	60,00	17,86
4.	Kuringkit	24,00	7,14
5.	Batu Tungku	25,00	7,44
6.	Panyipatan	69,00	20,54
7.	Batu Mulya	7,50	2,23
8.	Bumi Asih	15,00	4,45
9.	Suka Ramah	17,50	5,21
10.	Kandangan Baru	31,00	9,23
<b>Jumlah</b>		<b>336</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Seksi Tapem Kecamatan Panyipatan

Tabel 5.

## Jumlah Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Panyipatan

No.	Desa	Rukun Tetangga (RT)	Rumah Tangga
1.	Batakan	21	1.418
2.	Tanjung Dewa	15	912
3.	Kandangan Lama	9	846
4.	Kuringkit	10	553
5.	Batu Tungku	12	774
6.	Panyipatan	15	786
7.	Batu Mulya	15	570
8.	Bumi Asih	13	523
9.	Suka Ramah	16	758
10.	Kandangan Baru	10	514
<b>Jumlah</b>		<b>154</b>	<b>136</b>

Sumber: Seksi Tapem Kecamatan Panyipatan

#### d. Demografi

Dalam pelaksanaan roda pemerintahan salah satu komponen yang sangat penting adalah masyarakat / penduduk, dimana keberhasilan dari suatu pemerintahan bisa dilihat dari peran serta masyarakatnya dalam mendukung program-program serta peraturan-peraturan yang telah disusun oleh aparat pemerintah tersebut.

Masyarakat Kecamatan Panyipatan merupakan penduduk yang heterogen dengan berbagai macam suku, namun kebhinekaan ini memberikan dinamika tersendiri bagi masyarakat Kecamatan Panyipatan.

Tabel 6.

Jumlah penduduk Kecamatan Panyipatan

No	Desa	Jumlah		Rata-rata jiwa per Rata
		Rumah Tangga	Penduduk	
1.	Batakan	1.418	5.671	4
2.	Tanjung Dewa	912	3.086	3
3.	Kandangan Lama	846	2.517	3
4.	Kuringkit	553	1.669	3
5.	Batu Tungku	774	2.414	3
6.	Panyipatan	786	2.666	3
7.	Batu Mulya	570	1.831	3
8.	Bumi Asih	523	1.669	3
9.	Suka Ramah	758	2.789	4
10.	Kandangan Baru	514	1.774	3
<b>Jumlah</b>		<b>8.172</b>	<b>7.654</b>	<b>32</b>

Sumber : Seksi Tapem Kecamatan Panyipatan

Tabel 7.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Rasio
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Batakan	2.527	2.378	4.905	103,69
2.	Tanjung Dewa	1.520	1.465	2.985	102,65
3.	Kandangan Lama	1.215	1.220	2.435	98,02
4.	Kuringkit	861	812	1.673	103,16
5.	Batu Tungku	1.331	1.256	2.587	107,84
6.	Panyipatan	1.408	1.429	2.837	95,85
7.	Batu Mulya	973	970	1.943	100,63
8.	Bumi Asih	882	877	1.759	102,83
9.	Suka Ramah	1.267	1.184	2.451	104,83
10.	Kandangan Baru	958	875	1.834	98,86
<b>Jumlah</b>		<b>12.943</b>	<b>12.466</b>	<b>25.409</b>	<b>101,70</b>

Sumber : Data Kependudukan Kab. Tanah Laut Semester 1 Tahun 2020, Disdukpencapil Kab. Tanah Laut

## **BAB II**

### **ARAH KEBIJAKAN UMUM SKPD**

#### **A. Visi dan Misi**

Perencanaan sebagai salah satu unsur dalam proses manajemen memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Perencanaan yang baik tentunya disusun melalui proses dan analisis serta berorientasi pada visi dan misi organisasi. Sistem perencanaan yang efektif sangat diperlukan karena 2 (dua) alasan yaitu (1) untuk merespon perubahan lingkungan internal dan eksternal dan (2) untuk mengorganisir sumber daya bagi peningkatan kinerja. Inti kegiatan perencanaan adalah penyusunan program kerja yang jelas dan dapat diimplementasikan sehingga menjamin keberlangsungan hidup organisasi dalam lingkungan yang senantiasa berubah-ubah.

Kantor Kecamatan Panyipatan dalam menjabarkan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 berkewajiban menyusun *Rencana Strategis Kantor Kecamatan Panyipatan Tahun 2018-2023* yang memuat visi dan misi dalam mendukung program pembangunan Bupati Tanah Laut dengan berlandaskan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam era otonomi yang berorientasi pada kemandirian daerah sesuai semangat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka azas-azas transparansi dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan harus menjadi dasar utama dalam upaya

mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam mengeksploitasi potensi-potensinya dengan optimal.

Rencana strategis Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dirumuskan dan disusun berdasarkan:

- Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanah Laut 2018 - 2023
- Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Panyipatan
- Dokumen-dokumen perencanaan lainnya
- Memperhatikan aspirasi dan isu yang berkembang
- Berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Proses perencanaan strategi lebih bersifat konseptual. Komponen penting dalam perencanaan strategi adalah visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Dalam pelaksanaan kantor Kecamatan Panyipatan Mengacu Pada Visi Kabupaten Yaitu **“Terwujudnya Tanah Laut yang berkarya, inovasi, tertata, religius, aktual dan sinergi (BERINTERAKSI)”**

Visi diatas dimaksudkan untuk menjadi dasar Kecamatan Panyipatan sebagai instansi pemerintah daerah yang berkompeten dan profesional dalam pelayanan publik kepada masyarakat serta dapat menciptakan hal-hal baru dalam pelayanan yang pada akhirnya mampu bersinergi dengan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terciptanya Indek Kepuasan Masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan Visi yakni Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI, maka untuk pencapaiannya ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Berkarya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
2. Berkarya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
3. Berkarya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi;
4. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat;
5. Berinovasi untuk melahirkan industri kreatif;
6. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government);
7. Menerapkan prinsip-prinsip orang yang tepat dan cerdas pada jabatan yang selaras di dalam pemerintahan;
8. Religius dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan beragama;
10. Membangun sinergitas yang baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan;
11. Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Desa, Kelurahan, dan Kecamatan dalam Rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan menitikberatkan pada visi dan misi yang telah diuraikan diatas maka tujuan yang mengacu pada renstra Kecamatan Panyipatan diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Persentase penurunan pengaduan masyarakat Kecamatan Panyipatan.

## **B. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD**

Rencana strategi Kecamatan Panyipatan merupakan suatu upaya atau sarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, strategi organisasi Pemerintah Kecamatan disusun dengan dasar pemberdayaan semua potensi, kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan peluang yang ada serta pertimbangan kelemahan dan ancaman organisasi.

Adapun strategi Pemerintahan Kecamatan Panyipatan dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dalam melaksanakan tugas dan pembinaan Aparatur Kecamatan serta penyempurnaan mekanisme kerja.
2. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan dalam memenuhi standar kualifikasi aparatur, perlu peningkatan aparatur melalui pemenuhan persyaratan akademis maupun pendidikan dan pelatihan yang terstruktur.
3. Mengoptimalisasikan penggunaan sarana prasarana yang dimiliki, sebagai penunjang bagi aparatur sehingga makin dapat diwujudkan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk mengayomi masyarakat yang terbesar merata diseluruh pelosok perdesaan.
4. Memberikan fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintahan desa guna mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri.

Untuk menjamin rencana strategi kebijakan terlaksana dengan baik guna mencapai tujuan dan sasaran, maka disusun suatu kebijakan sebagai pedoman atau acuan dalam menjabarkan kedalam program dan kegiatan. Adapun Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kecamatan Panyipatan adalah :

1. Peningkatan pemberdayaan aparatur, dengan mengikutsertakan pada berbagai kesempatan yang diminta oleh instansi pembina kepegawaian dalam penyelenggaraan diklat, kursus, sosialisasi kebijakan pemerintah, studi banding, agar wawasan, pengetahuan, keterampilan dan disiplin kerja meningkat.
2. Meningkatkan mutu kepemimpinan aparatur pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, melalui pendidikan dan latihan, baik formal, penjurangan maupun fungsional yang dikaitkan dengan pembinaan karir pegawai.
3. Meningkatkan fasilitasi bagi masyarakat dengan SKPD terkait untuk kemaslahatan masyarakat
4. Mengupayakan peningkatan kinerja aparatur kecamatan maupun aparatur desa
5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan
6. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan aset.

### **C. Prioritas SKPD**

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, Kantor Kecamatan Panyipatan menentukan Strategi Peningkatan Kinerja sebagai prioritas SKPD untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan :

1. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi Kecamatan Panyipatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi, sumber Daya Manusia (SDM), dana dan sarana prasarana yang ada untuk menyediakan pelayanan masyarakat yang prima dengan dukungan program yang jelas dan terukur.
3. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dibidang pemberdayaan.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**A. Pengelolaan Pendapatan**

Penjelasan pengelolaan pendapatan daerah (SKPD) tahun 2020 disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Kantor Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kantor Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.5.000.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.021.250,00,- atau 100,42% dari target pendapatan yang ditetapkan. Perolehan retribusi daerah berupa retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial. Target dan realisasi pendapatan yang dicapai dirinci sebagai berikut :

Tabel 8. Realisasi Pendapatan Kecamatan Panyipatan Tahun 2020

<b>Pendapatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Prosentase (%)</b>
Hasil retribusi daerah	5.000.250 ,-	5.021.250,-	100,42

Sumber: Simda Keuangan; 31 Desember 2020

Penerimaan retribusi tersebut dalam 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam akan disetorkan langsung ke rekening daerah, untuk selanjutnya dalam pelaporannya akan diinput dalam aplikasi keuangan di SKPD.

## B. Pengelolaan Belanja

Pengelolaan belanja daerah di Kantor Kecamatan Panyipatan di digunakan untuk membiayai belanja operasional, berupa belanja pegawai, belanja barang/ jasa serta belanja modal untuk mendukung pencapaian target kinerja. Rincian penggunaan belanja operasi antara lain :

### a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai disini merupakan kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja kompensasi yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk gaji, tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya, honorarium/upah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk Tahun Anggaran 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 9.

Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Panyipatan Tahun 2020

<b>Uraian Jenis Belanja Pegawai</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>(%)</b>
- Gaji dan Tunjangan	1.148.096.857,-	220.640.042	73,58
- Tambahan Penghasilan PNS	978.640.799,-	743.296.551,-	75,96
<b>Jumlah</b>	<b>2.126.547.646,-</b>	<b>1.638.898.793,-</b>	<b>77,06</b>

Sumber: Simda Keuangan; 31 Desember 2020

## b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa untuk Tahun Anggaran 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 10.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai Kecamatan Panyipatan Tahun 2020

No.	Uraian Jenis Barang	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.886.600,-	6.807.000,-	98,8
2.	Belanja alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar,battery kering)	3.779.300,-	3.744.000,-	99,1
3.	Belanja Perangko,Materai dan Benda pos lainnya	1.850.000,-	1.725.000,-	93,2
4.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.226.900,-	3.198.500,-	99,1
5.	Belanja Kelengkapan komputer (flash disk,mause,keyboard,hardisk,speaker)	6.866.400,-	6.816.000,-	99,2
6.	Belanja bahan / bibit tanaman	2.254.000,-	0,-	0
7.	Belanja Spanduk/dekorasi/baleho	10.630.000,-	1.135.000,-	
8.	Belanja bahan makanan / sembako	1.470.000,-	0,-	0
9.	Belanja Air	3.097.910,-	80.000,-	2,6
10.	Belanja Listrik	28.000.000,-	18.607.429,-	66,4

11.	Belanja Surat kabar/majalah	460.000,-	230.000,-	50
12.	Belanja kawat/feksimail/internet/TV kabel/ TV satelit	5.000.000,-	3.990.000,-	79,8
13.	Belanja dokumentasi	120.000,-	60.000,-	50
14.	Belanja tenaga ahli/narasumber/instruktur/tenaga teknis lainnya	2.200.000,-	0,-	0
15.	Belanja honorarium pegawai tidak tetap	200.400.000,-	200.400.000,-	100
16.	Belanja premi asuransi kesehatan	15.000.000	13.811.760,-	92,07
17.	Belanja Honorarium non PNS	300.000,-	300.000,-	100
18.	Belanja premi asuransi jaminan kecelakaan kerja	624.000	489.597,-	78,4
19.	Belanja premi asuransi jaminan kematian	960.000,-	612.003,-	63,7
20.	Belanja jasa service	8.800.000,-	5.056.000,-	57,4
21.	Belanja pengganti suku cadang	18.000.000,-	12.080.000,-	67,1
23.	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	55.637.500,-	48.504.200,-	87,1
24.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.00.000,-	4.118.800,-	41,18
25.	Belanja cetak	2.830.000,-	1.954.300,-	69,0
26.	Belanja penggandaan	2.837.600,-	1.852.600,-	65,2
27.	Belanja Sewa Sarana Mobil Darat	1.500.000,-	0,-	0
28.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.865.000,-	13.865.000,-	100
29.	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	11.850.000,-	11.850.000,-	

30.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	83.595.000,-	81.585.000,-	97,6
31.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.500.000,-	21.229.835,-	98,7
32.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.350.000,-	4.756.000,-	64,7
33.	Belanja hadiah/penghargaan berupa barang	2.946.400,-	0,-	0
<b>Jumlah</b>		<b>533.836.610,-</b>	<b>468.858.024,-</b>	<b>87,83</b>

Sumber: Simda Keuangan; 31 Desember 2020

### c. Belanja Modal

Anggaran dan realisasi Belanja Modal pada Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dalam periode Tahun Anggaran 20120 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 11.

Realisasi Belanja Modal Kecamatan Panyipatan Tahun 2020

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal Tanah	0,-	0,-	0,00
2.	Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan peralatan	40.900.000,-	40.900.000,-	100
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>40.900.000,-</b>	<b>40.900.000,-</b>	<b>100</b>

Sumber: Simda Keuangan; 31 Desember 2020

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKRUEEN**

#### **A. URUSAN WAJIB**

Penyelenggaraan urusan wajib SKPD dalam rangka mencapai Visi, Misi dan tujuan Kantor Kecamatan Panyipatan 5 (lima) tahun ke depan, dijabarkan dalam program dan kegiatan SKPD yang ada pada RKA dan DPA.

Kantor Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2020 melaksanakan 9 program dan 17 kegiatan, yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut melalui DPA SKPD Kantor Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2020.

Program dan kegiatan di Kantor Kecamatan Panyipatan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat
  - 1) Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi
  - 2) Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat Desa
  - 3) Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1) Penyediaan rapat- rapat, konsultasi dan koordinasi
  - 2) Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran
  - 3) Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD
3. Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
  - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
  - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
  - 1) Peningkatan kualitas pelayanan, informasi dan penanganan pengaduan

5. Program Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat
  - 1) Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Ketentraman dan Ktertiban Umum Masyarakat
6. Program Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kebudayaan di Masyarakat
  - 1) Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
  - 2) Pentas seni, budaya, Festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga
7. Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa
  - 1) Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Umum
8. Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
  - 1) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
  - 2) Perencanaan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa
9. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
  - 1) Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD
  - 2) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

## **B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Target dari program dan kegiatan yang sudah di rencanakan sebelumnya, baik melalui Rencana kerja (Renja) maupun RKA tahun anggaran 2020, merupakan target yang hendak dicapai oleh Kantor Kecamatan Panyipatan pada tahun anggaran 2020. Target pada Renja maupun RKA yang selanjutnya di tuangkan dalam DPA SKPD merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Realisasi kinerja dari program dan kegiatan yang sudah di laksanakan di Kantor Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2020 adalah

Tabel 12.  
**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
 KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN TA. 2020**

No	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100 %</b>		<b>100%</b>
1	Penyediaan rapat- rapat, konsultasi dan koordinasi	783 kali	783 kali	100%
2	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	10 jenis	10 jenis	100%
3	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	10 orang	10 orang	100%
<b>II</b>	<b>Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>	<b>100 %</b>		<b>50 %</b>
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 unit	12 unit	100%
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0 set	0 set	0.00%
<b>III</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan</b>	<b>100 %</b>		<b>100%</b>

	<b>Evaluasi Kinerja SKPD</b>			
6	Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD	2 dok	2 dok	100%
7	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	12 lap	12 lap	100%
<b>IV</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>100 %</b>		<b>0.00%</b>
8	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi	1 kali	0 kali	0.00%
9	Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat Desa	230 peserta	0 peserta	0.00%
10	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	0 desa	0 desa	0.00%
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>	<b>100 %</b>		<b>0.00%</b>
11	Peningkatan kualitas pelayanan, informasi dan penanganan pengaduan	0 orang	0 orang	0.00%
<b>VI</b>	<b>Program Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat</b>	<b>100 %</b>		<b>0.00%</b>
12	Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Ketentraman dan Ktertiban Umum Masyarakat	0 jenis	0 jenis	0.00%
<b>VII</b>	<b>Program Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Sosial dan</b>	<b>100 %</b>		<b>0.00%</b>

	<b>Kebudayaan di Masyarakat</b>			
13	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	0 kali	0 kali	0.00%
14	Pentas seni, budaya, Festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga	0 kali	0 kali	0.00%
<b>VIII</b>	<b>Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa</b>	<b>100 %</b>		<b>0.00%</b>
15	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Umum	0 orang	0 orang	0.00%
<b>IX</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan</b>	<b>100 %</b>		<b>100%</b>
16	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	1 kali	100%
17	Perencanaan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa	2 jenis	2 jenis	100%
	<b>Rata- rata</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>87,5%</b>

Dari tabel di atas menunjukkan ada beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah 100% yaitu:

1. Beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya hanya 0 % dikarenakan adanya reconfusing anggaran yang harus dilaksanakan oleh seluruh SKPD yang ada di kabupaten tanah laut. Kegiatan tersebut meliputi :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
  - b. Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi.
  - c. Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat Desa
  - d. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
  - e. Peningkatan kualitas pelayanan, informasi dan penanganan pengaduan
  - f. Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Ketentraman dan Ktertiban Umum Masyarakat
  - g. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
  - h. Pentas seni, budaya, Festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga
  - i. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Umum

Capaian kinerja rata- rata dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2020 hanya mencapai hasil 87,5 % berdasarkan target kegiatan yang tercantum di DPA perubahan.

### **C. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Berdasarkan APBD Tahun 2020, APBD Recofusing dan APBD Perubahan 2020 dalam hal ini Belanja Tidak langsung (BTL) dan Belanja Langsung, Kecamatan Panyipatan memperoleh alokasi dana Belanja sebesar Rp 2.701.474.266,00 dan terealisasikan sebesar Rp

2.1048.656.817,00. Dana tersebut terdiri atas Belanja Tidak langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Capaian BTL dan BL Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13.  
**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA  
 KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN TAHUN 2020**

<b>No</b>	<b>Belanja</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5
1	Belanja Tidak langsung	2.126.737.656,-	1.638.898.793,-	77,06
2	Belanja Langsung	533.836.610,-	468.858.024,-	87,83
<b>Jumlah</b>		<b>2.660.574.266,-</b>	<b>2.107.756.817,-</b>	<b>79,22</b>

Sumber: Simda Keuangan; 31 Desember 2020

Belanja Tidak Langsung merupakan kegiatan rutin untuk belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Realisasi Belanja Tidak langsung Kantor Kecamatan Panyipatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14.  
**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG  
 KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN TAHUN 2020**

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>1.148.096.857</b>	<b>895.602.242</b>	<b>78,00</b>
1	Gaji pokok PNS/ uang representasi	848.258.222	674.962.200	79,57
2	Tunjangan keluarga	126.793.002	88.895.128	71,11
3	Tunjangan jabatan	91.375.200	73.510.000	80,44
4	Tunjangan fungsional umum	16.746.982	14.035.000	83,80
5	Tunjangan beras	57.486.960	42.003.600	73,06
6	Tunjangan PPh/ tunjangan khusus	7.418.292	2.187.329	29,48
7	Pembulatan gaji	18.199	8.985	49,37
<b>II</b>	<b>Tambahan penghasilan PNS</b>	<b>978.640.799</b>	<b>743.296.551</b>	<b>75,95</b>
1	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja	978.450.789	743.296.551	90,47
2	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	190.010	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>2.126.737.656</b>	<b>1.638.898.793,-</b>	<b>77,06</b>

Sumber: Simda Keuangan; 31 Desember 2020

Total untuk anggaran Belanja Langsung (BL) tahun 2020 Rp 574.736.610,00. Dari jumlah anggaran Belanja Langsung tersebut terealisasi sebesar Rp 509.758.024,00 atau 88,69%. Rincian realisasi anggaran program dan kegiatan Kantor Kecamatan Panyipatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15.  
**ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN TAHUN 2020**

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>434.542.010,-</b>	<b>414.530.124,-</b>	<b>95,39</b>
1	Penyediaan Jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan kantor	111.065.000	109.189.835	98,31
2	Penyediaan Rapat - rapat, konsultasi dan koordinasi	106.493.010	90.026.929	84,54
3	Penyediaan Jasa penunjang kinerja SOPD	216.984.000	215.313.360	99,23
<b>II</b>	<b>Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana dan prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>	<b>92.437.500</b>	<b>69.759.000</b>	<b>75,47</b>
4	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	92.437.500	69.759.000	75,47
5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	0	0	0
<b>III</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD</b>	<b>6.274.000</b>	<b>5.323.900</b>	<b>84,86</b>
6	Penyusunam perencanaan dan kinerja SKPD	2.840.000	2.049.300	72,16

7	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	3.434.000	3.274.600	95,36
<b>IV</b>	<b>Program Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum	0	0	0
<b>V</b>	<b>Program koordinasi dan fasilitasi ketentramanan dan ketertiban umum masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	koordinasi dan fasilitasi pembinaan ketentramanan dan ketertiban umum masyarakat	0	0	0
<b>VI</b>	<b>Program Kordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	0	0	0
11	Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga	0	0	0
<b>VII</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>25.000.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>16,15</b>

12	Fasilitasi pembangunan sarana promosi dan hasil produksi	20.000.000	0	
13	Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat Desa	5.085.000	4.050.000	79,65
14	Pemberian stimulan pembangunan Desa	0	0	0,00
<b>X</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan</b>	<b>16.398.100</b>	<b>16.095.000</b>	<b>98,15</b>
15	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	9.198.100	8.910.000	95,09
16	Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah Desa	7.200.000	7.185.000	98,64
<b>XI</b>	<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	peningkatan kualitas pelayanan, informasi dan penanganan pengaduan	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>574.736.610,-</b>	<b>509.758.024,-</b>	<b>88,69</b>

### **Permasalahan dan Solusi**

Kantor Kecamatan Panyipatan, dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan pada tahun 2020 sudah baik, walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat didanai disebabkan adanya recopusing anggaran / Rasionalisasi Anggaran.

Sementara kendala yang terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat antara lain :

1. Kekurangan sumberdaya manusia untuk pelayanan kepada masyarakat yang lebih maksimal. Kedepannya diharapkan dapat menambah personil baik unsur ASN maupun tenaga honorer.
2. Kekurangan fasilitas sarana dan prasarana bagi aparatur terutama ketersediaan air bersih dan jaringan listrik yang sering mengalami pemadaman ditambah genset yang dimiliki kantor telah rusak berat dan sedang diusulkan untuk lelang sehingga tidak mampu memenuhi kekurangan tersebut.
3. Tantangan yang dihadapi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa karena aparatur telah secara mandiri mengemban dan mengelola keuangan desanya.

## **1. Urusan Pilihan**

( Kecamatan Panyipatan tidak menyelenggarakan urusan pilihan )

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

( Kecamatan Panyipatan tidak menyelenggarakan urusan Tugas  
Pembantuan )

**BAB VI**  
**PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

( Kecamatan Panyipatan tidak menyelenggarakan Tugas Umum  
Pemerintahan )

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada dari Bab I sampai dengan Bab VI, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Capaian fisik pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Panyipatan pada dasarnya sudah sangat baik ini dapat dilihat dari persentase capaian dari sisi kinerja sebesar 38,88% dan dari sisi realisasi keuangan sebesar 79,22%. Capaian kinerja masih belum mencapai 100% dari target yang ditetapkan karena ada beberapa program dan kegiatan yang tidak terealisasi yaitu:
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
  - b. Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi.
  - c. Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat Desa
  - d. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
  - e. Peningkatan kualitas pelayanan, informasi dan penanganan pengaduan
  - f. Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Ketentraman dan Kertertiban Umum Masyarakat
  - g. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
  - h. Pentas seni, budaya, Festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga
  - i. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Umum
2. Capaian anggaran belanja Kecamatan Panyipatan baik untuk belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sudah baik yaitu dengan persentase sebesar 79,54% untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) yang terdiri dari Gaji dan Tunjangan, dan

77,06% untuk Belanja Langsung (BL) yang terdiri dari belanja Modal, belanja pegawai dan belanja barang jasa.

3. Capaian target untuk pendapatan tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan melainkan hanya mencapai 100,42% dari target Rp5.000.250,- terealisasi sebesar Rp5.021.250,-

## **B. KEBERHASILAN/ PRESTASI/ PENGHARGAAN**

Prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Kecamatan Panyipatan selama Tahun 2020 adalah dari kegiatan tim penggerak PKK Kecamatan Panyipatan yang meraih penghargaan di Tingkat Kabupaten. Penghargaan tersebut antara lain :

Penghargaan Tingkat Kabupaten, terdiri dari :

- 1) Juara II Lomba Menu kudapan non beras.
- 2) Juara II Lomba Menu kudapan berbahan lokal.
- 3) Juara harapan II Lomba UP2K.
- 4) Juara harapan II Lomba Pengisian KMS.
- 5) Juara harapan III Lomba Merangkai Bunga.

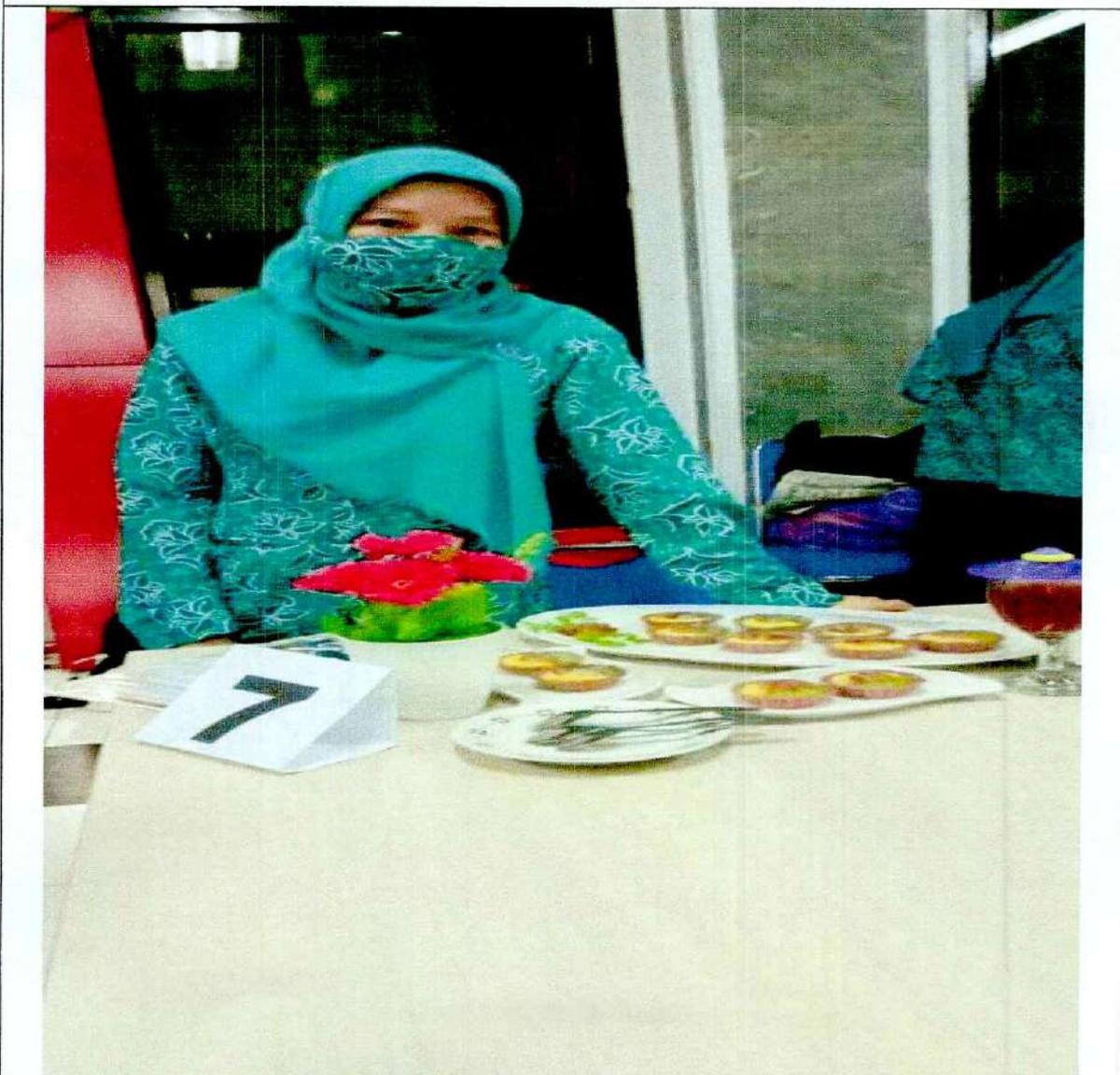
Demikian laporan LKPJ dan LPPD Kecamatan Panyipatan ini disusun dan dibuat berdasarkan kondisi yang ada saat ini, tidak lupa juga kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam partisipasinya sehingga tersusunnya laporan ini sesuai waktu yang ditentukan. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di daerah Kabupaten Tanah Laut.



CAMAT PANYIPATAN,

**AGUS SETIYO, S.STP, MM**  
**NIP. 19850808 200412 1 001**

## LOMBA KUDAPAN NON BERAS JUARA II



### LOMBA MERANGKAI BUNGA JUARA HARAPAN III



## LOMBA UP2K JUARA HARAPAN II



## LOMBA PENGISIAN KMS JUARA HARAPAN II

